

ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2014-2018



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TOHA ARIF UL HUDA
YOGYAKARTA**
NIM. 16810066

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2014-2018



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

TOHA ARIF UL HUDA

NIM. 16810066

DOSEN PEMBIMBING:

ABDUL QOYUM, S.E.I., M.Sc.Fin

NIP. 19850630 201503 1 007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DEB/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOHA ARIF UL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16810066
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.
SIGNED

Valid ID: 5ec694d2918b5



Pengaji I

Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 5ec694c54e99b



Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 5ec639c29bc



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ef06108b05a

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Toha Arif Ul Huda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Toha Arif Ul Huda

NIM : 16810066

Judul Skripsi : **“Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Ngawi
Tahun 2014-2018”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Juni 2020

Pembimbing,



Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin
NIP. 19850630 201503 1 007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Toha Arif Ul Huda

NIM : 16810066

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipahami dan digunakan semestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2020

Penyusun



Toha Arif Ul Huda
NIM. 16810066

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Toha Arif Ul Huda
NIM	:	16810066
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*non-exclusive free right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

“Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018”

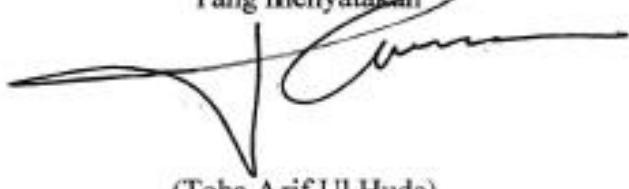
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 8 Juni 2020

Yang menyatakan



(Toha Arif Ul Huda)

HALAMAN MOTTO

"INNAMAL A'MALU BINNIYAT..." HR. BUKHORI"

KEHIDUPAN ITU LAKSANA LAUTAN. ORANG YANG TIADA BERHATI-HATI DALAM MENGAYUH PERAHU, MEMEGANG KEMUDI DAN MENJAGA LAYAR, MAKA KARALAH IA DIGULUNG OLEH OMBAK DAN GELOMBANG. HILANG DITENGAH SAMUDRA YANG LUAS. TIADA AKAN TERCAPAI OLEHNYA TANAH TEPI.

~BUYA HAMKA~

TATAPLAH TEGAS MASA DEPANMU, JADILAH PEMENANG.

~ PENYUSUN ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

RASA SYUKUR YANG TAK TERHINGGA ATAS SEGALA KARUNIA, HIDAYAH DAN PETUNJUK SERTA KEMUDAHAN YANG ALLAH SWT LIMPAHAN SEHINGGA PENYUSUN MAMPU MERAMPUNGKAN SKRIPSI INI DENGAN PENUH RASA KEBAHAGIAAN.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMPAHKAN UNTUK KEDUA ORANGTUA YANG SANGAT SAYA CINTAI DAN SAYA HORMATI (BAPAK KASBOLAH DAN IBUK SUNDARI). TERIMA KASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN, KASIH SAYANG SERTA DOA YANG SELALU ENGKAU BERIKAN. TAK AKAN PERNAH SANGGUP UNTUKKU MEMBALAS SEMUA KEBAIKAN YANG ENGKAU BERIKAN.

KEPADA ADIK-ADIKKU YANG SELALU SEMANGAT MENUNTUT ILMU, ALI ROHMAN HAKIM DAN SUKRON QODAR ROMADHON. BESERTA UNTUK SEGENAP KELUARGA.

KEPADA REKAN-REKAN SEPERJUANGAN SEMASA KULIAH YANG MEMBERIKAN SEMANGAT, MOTIVASI DAN MASUKAN SEHINGGA SKRIPSI INI DAPAT TERSELESAIKAN.

UNTUK ALMAMATER TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang digunakan pada penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	be
ت	Tâ"	T	te
س	Sâ	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Hâ"	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ز	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	î	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	§	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ“	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za“	ܼ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	ܼ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ“	F	Ef
ق	Qâf	ܼ	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ“	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ“	ܼ	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

- Bila dimatikan tulis h

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

٠	Ditulis	A
٠	Ditulis	I
ُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تَنْسَى	ditulis	Ā <i>tansā</i>

3.	Fathah + yā" mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>I</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوضٌ	ditulis	<i>U</i> <i>furuūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Apabila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan memakai huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

الفرض ذوي	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya, sehingga penyusun mampu merampungkan skripsinya yang berjudul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018”. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya di *yaumil akhir* nanti, Amiin. Penelitian skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelas sarjana S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semata-mata karena keterbatasan Penyusun. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penyusun berikan kepada berbagai pihak atas segala bantuan dan dukungannya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materiil. Dengan segala kerendahan hati, pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sunaryati, S.E., M.Si., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Anggari Marya Kresnowati, S.E., M.E., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) selama menempuh kuliah.
5. Bapak Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin., selaku dosen pembimbing skripsi (DPS) yang telah memberikan masukan, kritik dan saran, mengarahkan serta membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan jajaran staf Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Pegawai dan jajaran staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Keluarga tercinta Bapak Kasbolah dan Ibuk Sundari, adik-adikku Ali Rohman Hakim dan Sukron Qodar Romadhon, segenap keluarga dan saudara yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi saya.
9. Keluarga besar Menwa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya rekan-rekan seperjuangan saya Yudha 40, alumni, senior dan adik-adik yang menemani segala proses dan belajar selama menjadi personil aktif.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah Angkatan 2016, khususnya kelas B yang telah menjadi teman berjuang dalam menempuh pendidikan kuliah, terimakasih atas kebersamaannya.
11. Keluarga besar takmir Masjid Babussalam Polda DIY yang telah mengajarkan banyak ilmu, semoga keberkahan Allah SWT berikan kepada kita semua.
12. Teman-teman Kelompok KKN angkatan-99 Suku Tengger. Terimakasih atas kerjasama, kekompakan, kreativitas, senang dan duka yang dihadapi selama masa KKN.
13. Segenap pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian tugas akhir ini serta terlibat selama perkuliahan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 8 Juni 2020
Penyusun



Toha Arif Ul Huda
NIM. 16810066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori	14
1. Teori Pembangunan ekonomi	14
2. Teori Pertumbuhan ekonomi	17
3. Pembangunan ekonomi dalam perspektif islam	21
4. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam	22
5. Otonomi daerah	23
6. Teori basis ekonomi	25
7. PDRB	27
8. Sektor Unggulan	30
B. Telaah Pustaka	32
C. Kerangka Pemikiran Teoritis	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Sumber dan Jenis Data	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Definisi Operasional Variabel	52
E. Teknik Analisis Data	54
1. <i>Location Quotient</i>	54
2. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	57
3. <i>Shift share</i>	59
4. Tipologi Klassen	63
5. <i>Overlay</i>	67
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi	68
1. Kondisi Geografis, Luas Wilayah dan Topografi	68
2. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan	71
3. Kondisi Ekonomi	72
4. Kondisi Pendidikan	74

5. Kondisi Kesehatan.....	77
B. Analisis dan Pembahasan	79
1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	79
2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	83
3. Analisis <i>Shift share</i>	87
4. Analisis Tipologi Klassen.....	93
5. Analisis <i>Overlay</i>	100
6. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	i



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Wilayah administrasi Kabupaten Ngawi (Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Presentase terhadap luas kabupaten, Jarak ke Ibukota Kabupaten)	69
Tabel 4.2 Ketenagakerjaan(Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi, 2018).....	71
Tabel 4.3 Persentase Partisipasi Sekolah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2017 (Menurut Kelompok Umur Sekolah)	75
Tabel 4.4 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ngawi.....	77
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018	80
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan MRP Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018	83
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan <i>Shift share</i> Kabupaten Ngawi tahun 2014-2018 (miliar Rupiah)	86
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan.....	91
Tabel 4.9 Klasifikasi Sektor PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 berdasarkan Analisis Tipologi Klassen	93
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan <i>Overlay</i> Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018.....	96
Tabel 4.11 Tabel Penentuan Sektor Unggulan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ngawi68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 10 Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur	4
Grafik 1.2 10 Kabupaten Dengan PDRB Perkapita Terendah di Provinsi Jawa Timur	5
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018	7
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)	i
Lampiran 2. Data PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)	ii
Lampiran 3. Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	iii
Lampiran 4. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	iv
Lampiran 5. Hasil analisis <i>Shift share</i>	ix
Lampiran 6. Analisis Tipologi Klassen	xi
Lampiran 7. Analisis <i>Overlay</i>	xiii
Lampiran 8. Curiculum Vitae.....	xiv



ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses pembangunan yang dilakukan guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian baru sehingga akan memberikan dampak besar bagi perekonomian di suatu daerah. Tujuan pembangunan perekonomian daerah pada dasarnya untuk mewujudkan produktifitas serta kemandirian dari sisi ekonomi bagi daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Ngawi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Shift share*, Tipologi Klassen dan *Overlay*. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa sektor unggulan di Kabupaten Ngawi, diantaranya yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Terdapat pula sektor ekonomi unggulan tapi tertekan dan sektor potensial. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perekonomian di Kabupaten Ngawi sehingga diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor yang belum maju.

Kata kunci: Sektor-sektor ekonomi, *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Shift share*, Tipologi Klassen, *Overlay*, sektor unggulan, prioritas pembangunan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Regional economic development is a process of development done to promote the growth of new economic sectors so that it will give a big impact to the economy in an area. The purpose of regional economic development is essentially to realize the productivity and independence of the economic side for the area. This research aims to determine the superior economic sector in Ngawi regency. The data used is secondary data from the gross Regional domestic product of Ngawi Regency and East Java Province in 2014-2018 which was obtained from the Central Statistic Agency (BPS). The methods of analysis used in this research are *Location Quotient* analysis (LQ), Growth Ratio Model (MRP), *Shift share*, Typology Klassen and *Overlay*. Based on the results of this study, there are several sectors in Ngawi district, such as information and communication sector, health services sector and social activities and other services sectors. There is also an excellent economic sector but depressed and potential sectors. These sectors can be a priority in implementing the policy of economic development in Ngawi district so it is expected to move the sectors that are not yet advanced.

Keywords: Economics Sector, *Location Quotient* (LQ), Growth Ratio Model (MRP), *Shift share*, Tipologi Klassen, *Overlay*, leading sector, development priority

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola serta mengatur sendiri Urusan Pemerintahannya, diberikan otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Tujuannya adalah mempercepat dari kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat tercapai apabila pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat ditingkatkan, mewujudkan daya saing dari daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara. Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan harus efisien dan efektif, aspek-aspek hubungan antar Pemerintahan perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan, baik itu pusat maupun daerah. Keberagaman dari masing-masing daerah akan menjadi potensi luar biasa untuk kemandirian Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan ini telah diatur secara rinci oleh negara dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Kuncoro berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah semua harus diatur dan dikerjakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi dan melibatkan masyarakatnya sehingga pembangunan ini dikerjakan dengan bersama-sama dan tentunya

perlu adanya konsistensi baik dari pemerintah maupun masyarakatnya, dikutip dari Rohman (2011). Pembangunan ekonomi daerah ini dilakukan untuk mengelola berbagai sumberdaya yang dimiliki daerah, dikembangkan sebagai penggerak kegiatan perekonomian sehingga nantinya lapangan pekerjaan baru akan banyak tersedia, hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya (Rohman, 2011).

Pada dasarnya pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi dikerjakan guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor perekonomian baru sehingga akan memberikan dampak besar bagi perekonomian di suatu daerah. Tujuan pembangunan perekonomian daerah pada dasarnya untuk mewujudkan produktifitas serta kemandirian dari sisi ekonomi bagi daerah tersebut, dengan memanfaatkan kondisi sosial serta geografis yang ada di daerah, potensi-potensi perekonomian dapat dikembangkan sehingga dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan utama pembangunan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi adalah makna dari Pembangunan Ekonomi, atau dalam istilah asingnya "*Economic development is growth plus change*". Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan lebih cepat tercapai apabila pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang tersedia (Sukirno, 2013).

Meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah merupakan salah satu tujuan dari adanya pembangunan daerah. Inisiatif pembangunan daerah tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah akan tetapi menjadi kewajiban bersama yaitu pemerintah, para *stake holder* dan tentu masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya dalam mengelola berbagai sumberdaya daerah, dengan adanya kolaborasi ini diharapkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat lebih cepat tercapai (Arsyad, 2016).

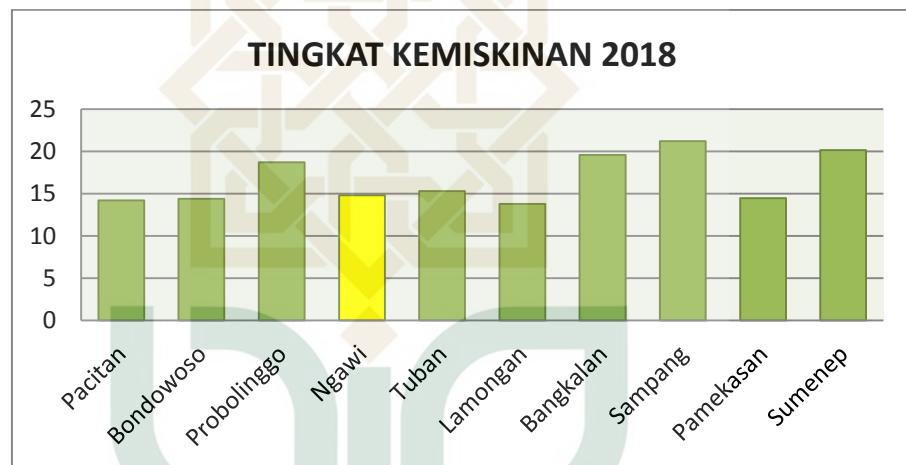
Mendaras pada aturan pemerintahan daerah yang ada, kreatifitas dari pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar mampu mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian dan investasi. Karena peranan dari investor juga sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh sebab itu perlu adanya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan daya tarik investasi (Wijaya, 2012).

Keberhasilan otonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar daerah menyumbang terhadap PDB nasional pada periode tertentu. Pada tahun 2018, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan sumbangan terbesar yaitu senilai 2.559,17 triliun (17.34%). Kontribusi terbesar kedua diikuti oleh Provinsi Jawa Timur senilai 2.189,78 triliun (14.61%). (BPS, 2019d)

Meskipun tercatat sebagai penyumbang PDB terbesar kedua secara nasional, akan tetapi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi sebesar 10.37% di atas rata-rata nasional

9.41%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian belum merata sampai ke daerah-daerah. Masih banyak kabupaten-kabupaten yang ekonominya lambat sehingga pendapatan perkapitanya masih rendah serta angka kemiskinannya masih tinggi. Salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta pendapatan perkapitanya rendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Ngawi.

Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur

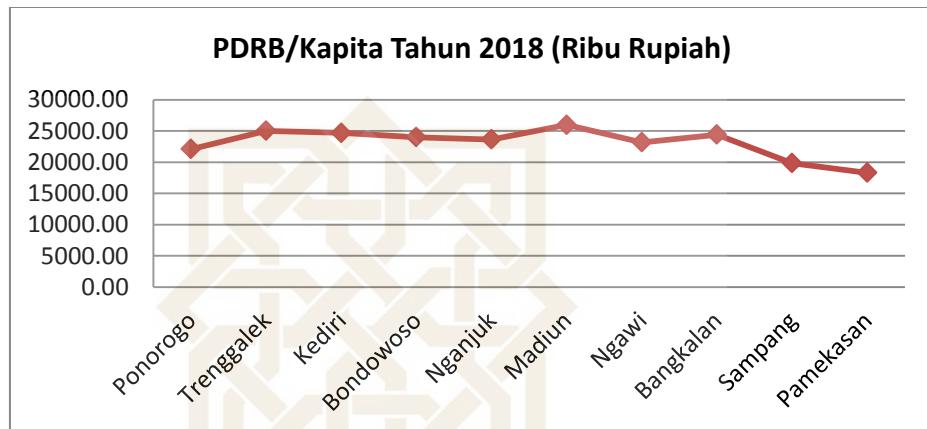


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Dari data di atas dapat dilihat 10 wilayah kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 21,21%, diikuti oleh Kabupaten Sumenep sebesar 20,16% dan Kabupaten Bangkalan dengan 19,59%. Kabupaten Ngawi berada pada posisi ke-6 dengan tingkat kemiskinan sebesar 14.83% (BPS, 2019). Kemudian bila dilihat dari PDRB per kapitanya pada tahun 2016, Kabupaten Ngawi termasuk ke dalam 5 kabupaten dengan PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Timur (BPS, 2018). PDRB per kapita Kabupaten Ngawi sebesar 23.182,88 (ribu rupiah),

sedangkan Kabupaten dengan PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Pamekasan dengan nilai sebesar 18.314,65 (ribu rupiah). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 1.2 PDRB Perkapita Terendah di Provinsi Jawa Timur



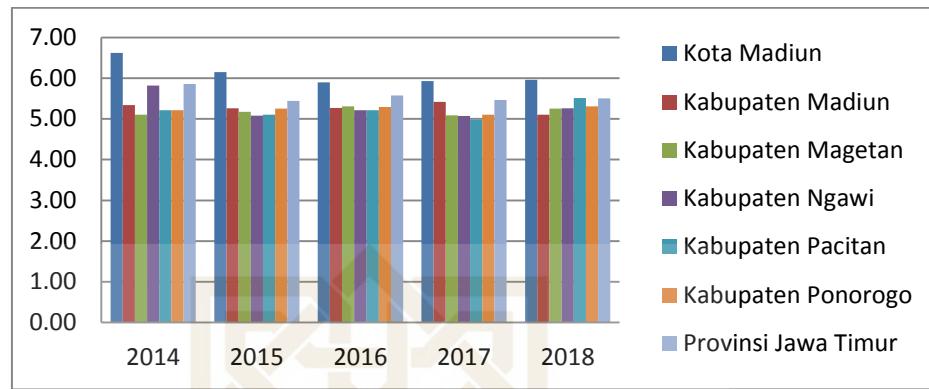
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Penyusun mengambil objek penelitian Kabupaten Ngawi karena dinilai memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk menjadi daerah sejahtera. Apabila dilihat dari letak geografis, Kabupaten Ngawi lebih potensial dibanding daerah lain, berada pada jalur lintas provinsi yang padat untuk lalu lintas distribusi kegiatan perekonomian dan berada di pintu barat Jawa Timur sehingga cukup dekat untuk menjangkau wilayah-wilayah di Jawa Tengah khususnya wilayah Solo dan sekitarnya yang secara ekonomi lebih maju. Ketersediaan lahan juga masih luas dan tenaga kerja juga cukup memadai. Yang perlu didorong adalah menarik minat investor. Perlu adanya kebijakan pembangunan yang produktif sehingga dapat menarik minat investor masuk ke Kabupaten Ngawi sehingga perekonomian bisa bergerak.

Sejalan dengan kondisi di atas, dikutip dari media publikasi Pemerintah Kabupaten Ngawi pada acara Seminar Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ngawi, disampaikan oleh Wardhani selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi sedang menjalankan program percepatan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan visi misi Gubernur Jawa Timur dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi Jatim, akselerasi pembangunan ekonomi, struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi. Sementara Sekda Ngawi, Triwidiyanto dalam sambutannya menekankan inovasi dalam pembangunan ekonomi. (Maria, 2019)

Pemerintah Jawa Timur membagi wilayah pembangunan menjadi beberapa koridor yang digambarkan dengan SWP. Berdasarkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi masuk dalam area pengembangan bersama dengan Kota Madiun selaku pusat pengembangan wilayah, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Madiun.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB di atas, dapat kita cermati bahwa hanya Kota Madiun dan Kabupaten Pacitan yang pertumbuhan ekonominya mampu melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonominya selalu berada di atas Provinsi sedangkan Kabupaten Pacitan baru di tahun 2018 pertumbuhan ekonominya berada di atas Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota lain pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur. (BPS, 2020) Tentu pencapaian ini masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Ngawi untuk terus meningkatkan perekonomiannya agar mampu bersaing dengan Kabupaten /Kota lain sehingga pertumbuhan ekonominya mampu di atas Provinsi.

Setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Ngawi akan berhasil mendorong ekonomi masarakat apabila kebijakan tersebut tepat sasaran. Pembangunan ekonomi yang dijalankan Pemerintah

Kabupaten Ngawi dapat dilihat berdasarkan komposisi dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. (Rohman, 2011)

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Ngawi pada tahun 2014 mencapai 13.311.843,68 (juta rupiah). Angka ini dari tahun ke tahun secara konsisten mengalami peningkatan hingga tahun 2018 mencapai 19.241.785,61 (juta rupiah), setiap tahunnya tumbuh berkisar 5,32%. (BPS, 2019) Distribusi terbesar disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata di atas 35% setiap tahunnya. Distribusi terbesar kedua disumbangkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 15% setiap tahunnya. Kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi penyumbang terkecil yaitu sebesar 0.09% setiap tahunnya.

Dalam menjalankan roda perekonomian di suatu daerah, sektor-sektor kunci yang berperan sebagai penggerak perekonomian inilah yang bisa dikatakan sebagai sektor unggulan karena memiliki peran yang sangat dominan (Hajeri, Yurisinthae, & Dolorosa, 2015). Tertunya sektor unggulan ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB daerah tersebut, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sektor inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dari penelitian sebelumnya yang mencakup Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) disusun oleh Wahyudi (2017) menggunakan alat analisis LQ dan *Shift share* menunjukkan hasil bahwa sektor potensial di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011-2015 dengan tingkat kepotensianal

istimewa yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor *real estate* dan sektor jasa pendidikan. Penelitian Suciati (2017) menunjukkan hasil yang berbeda untuk Kabupaten Pacitan. Memakai alat analisis LQ, *Shift share*, serta Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Pacitan tahun 2011-2015 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun dalam penelitian Sanjaya (2014) dengan alat analisis atau metode *Shift share* menunjukkan sektor yang berpotensi bagus di Kota Madiun tahun 2007-2011 yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan Penelitian Wijaya (2012) menggunakan alat analisis LQ, *Shift share*, dan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa terdapat sektor unggulan di Kabupaten Ngawi, sektor tersebut adalah sektor pertanian dan sektor konstruksi.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain berbeda objek kabupaten yang diteliti serta pemilihan tahun penelitian yang lebih terbaru, tentunya hasil pasti akan sangat berbeda karena masing-masing kabupaten memiliki sumber daya dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kondisi sosial dan geografis yang berbeda-beda, oleh sebab itu setiap daerah mempunyai sektor-sektor potensialnya masing-masing. Sehingga strategi dan arah kebijakan pembangunannya pun berbeda. Dari beberapa penelitian di atas tercermin bahwa meskipun dalam SWP yang sama, setiap kabupaten/kota mempunyai sektor unggulan dan potensialnya masing-masing.

Pemerintah daerah harus sadar akan adanya potensi-potensi perekonomian, baik itu dari sumber daya alam ataupun yang lainnya, sehingga pemerintah tepat sasaran dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Uraian di atas inilah yang menjadi dasar penyusun memilih penelitian yang berjudul **“ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014-2018”**. Penelitian ini menggunakan data lapangan usaha PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah maka diperlukan pemerataan dalam merencanakan pembangunan ekonomi sehingga dapat dicapai produktifitas yang tinggi, memunculkan keunggulan kompetitif sehingga memiliki daya saing yang baik serta memaksimalkan potensi sektoral yang dimiliki. Kebijakan pemerintah yang tepat akan memudahkan tercapainya pembangunan perekonomian daerah. Berdasar pada uraian serta latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu:

1. Sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi ?
2. Sektor apakah yang menjadi sektor kompetitif perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi ?
3. Bagaimana klasifikasi sektoral perekonomian Kabupaten Ngawi ?

4. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan di perekonomian Kabupaten Ngawi ?
5. Sektor apakah yang semestinya menjadi prioritas dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian kali ini, beberapa hal yang ingin dicapai oleh penyusun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui sektor kompetitif perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui klasifikasi sektoral perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi.
4. Untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Untuk mengetahui sektor apakah yang semestinya menjadi prioritas pembangunan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi.

Dari penelitian ini, penyusun sangat berharap bahwa akan ada banyak pihak yang akan menerima manfaat, utamanya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya studi pustaka di bidang ekonomi serta berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian yang serupa. Penyusun juga berharap penelitian ini dapat memenuhi

kebutuhan akademik penyusun sehingga kedepannya bisa mendukung kelancaran penyusun dalam menyelesaikan studi S1 nya di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian yang dilakukan, penyusun berharap bisa berguna bagi para praktisi yang berwenang khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai informasi serta bahan masukan dalam penetapan kebijakan perekonomian kedepan, sehingga kedepannya kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi menjadi semakin maju dan berkembang.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan kali ini terbagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan secara terarah dan sistematis berdasarkan kaidah penelitian yang ada. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab pertama, berisikan mengenai fenomena atau isu-isu yang terjadi beberapa tahun terakhir terkait dengan kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi yang diuraikan menjadi latar belakang penelitian. Kemudian dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB 2 Landasan Teori

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini. Terdapat juga telaah pustaka yang terdiri dari penelitian-penelitian

terdahulu mengenai sektor unggulan Kabupaten Ngawi atau Kabupaten lain, serta terdapat kerangka pemikiran dari penyusun.

BAB 3 Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana penelitian ini dikerjakan, antara lain mengenai jenis penelitian, deskripsi, sumber dan teknik dalam pemilihan data, penjelasan dari variabel yang diteliti, serta metode dan alat analisis yang digunakan.

BAB 4 Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat berisikan pembahasan berdasar pada hasil analisis data yang telah dilakukan. Analisis dan pembahasan akan diuraikan dengan jelas dan dikaitkan bersama teori serta hasil penelitian terdahulu.

BAB 5 Penutup

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dikemukakan juga mengenai berbagai saran yang membangun agar tercipta hasil penelitian yang lebih komprehensif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2018 menunjukkan hasil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Penyusun berhasil menjabarkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu: pertama, berdasarkan hasil analisis LQ dapat diketahui beberapa sektor di Kabupaten Ngawi yang termasuk sektor ekonomi basis. Terdapat 7 sektor ekonomi basis, diantaranya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan serta Jaminan Sosial, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Tujuh sektor inilah yang memiliki rata-rata produksi di atas Provinsi Jawa Timur sehingga berpotensi untuk di ekspor ke daerah-daerah lain yang memerlukan.

Kedua, berdasarkan analisis *Shift share*, Kabupaten Ngawi mempunyai sektor dengan keunggulan kompetitif ($C_{ij} +$) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor

Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Lainnya.

Ketiga, berdasarkan data pertumbuhan setiap sektor ekonomi di Kabupaten Ngawi, dilakukanlah analisis MRP untuk menentukan klasifikasi sektor-sektor ekonomi. Hasilnya telah dikelompokkan ke dalam 4 kategori antara lain: pertama, sektor yang tergolong Klasifikasi I ($RP_R +, RP_S +$) adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kedua, Klasifikasi II ($RP_R +, RP_S -$) yaitu tidak terdapat satu sektor pun yang masuk pada klasifikasi ini. Ketiga, Klasifikasi III ($RP_R -, RP_S +$) yaitu sektor Pengadaan Air, Pengeloaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Lainnya. Keempat, Klasifikasi IV ($RP_R -, RP_S -$) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor *Real estate*, dan sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dari hasil analisis Tipologi Klassen dapat diketahui sektor ekonomi andalan di Kabupaten Ngawi diantarnya yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Selanjutnya, sektor

yang unggul di Kabupaten Ngawi jika dilihat dari hasil analisis *Overlay*, dilihat berdasarkan kriteria kontribusi dan pertumbuhan yaitu sektor Pengadaan Air, Pengeloaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya.

Berdasarkan hasil pengelompokan kelima alat analisis yang digunakan, terdapat tiga sektor unggulan, satu sektor unggulan tapi tertekan dan dua sektor potensial di Kabupaten Ngawi pada tahun 2014-2018. Tiga sektor unggulan tersebut yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tergolong sebagai sektor unggulan tapi tertekan. Serta sektor yang dinilai potensial yaitu sektor Pengadaan Air, Pengeloaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Berdasarkan tiga kategori sektor di atas (sektor unggulan, sektor unggulan tapi tertekan, dan sektor potensial), sektor-sektor ini yang bisa dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Sektor-sektor tersebut akan mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Ngawi kedepannya sehingga kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun bisa semakin meningkat.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian kali ini bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menetapkan strategi pembangunan ekonominya, yaitu dapat memprioritaskan sektor-sektor unggulan yang dimiliki, sektor unggulan yang sedang tertekan dan sektor potensial yang ada guna mendukung percepatan pembangunan daerah disamping juga berupaya memperbaiki produktifitas sektor-sektor lain yang masih tertinggal.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan kabupaten-kabupaten lain atau provinsi lain, terutama pada sektor perekonomian sekunder dan tersier guna mendorong pembangunan ekonomi yang diharapkan.
3. Keterbatasan dari studi ini yaitu hanya mampu mengklasifikasikan pada tingkat sektor, tentunya hasil penelitian akan lebih mendalam bila mampu mengklasifikasikan pada tingkat sub-sektor. Oleh sebab itu penyusun menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji pada tingkat sub-sektor. Penyusun juga menyarankan untuk pemilihan objek penelitian sebaiknya adalah daerah-daerah yang masih tertinggal dan belum tergambar jelas struktur dan corak kegiatan ekonominya sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan atau bahan masukan bagi pembangunan daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222.
- Amalia, F. (2012). Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. *Jurnal Etikonomi*, 11(2), 196–207.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2016). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bharanti, E., Syauta, J., & Numberi, A. (2017). Klasifikasi dan Potensi Pengembangan Ekonomi Sektoral di Kabupaten Mamberamo Raya. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(1), 21–37.
- BI, D. S. (2015). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS. (2008). *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- BPS. (2018). *PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016*. Jawa Timur. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/01/16/222/pdrb-perkapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2010-2016.html>
- BPS. (2019a). *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018*. Kabupaten Ngawi.
- BPS. (2019b). *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2019*. Kabupaten Ngawi.
- BPS. (2019c). *PDRB Kabupaten Ngawi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2018*. Kabupaten Ngawi. Retrieved from <https://ngawikab.bps.go.id/dynamictable/2019/08/01/90/pdrb-kabupaten-ngawi-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2018.html>
- BPS. (2019d). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2018 (Miliar Rupiah)*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/957/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut->

- provinsi-2010-2018-ribu-rupiah-.html
- BPS. (2020). *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2014-2018*. Jawa Timur. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/1712/laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-persen-2014-2018.html>
- Hajeri, Yurisinthae, E., & Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 253–269.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maria, I. (2019). Seminar Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Ngawi.
- Maryanti, S., & Rasyad, R. (2015). Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru. *Pekbis Jurnal*, 7(1), 31–45.
- Miftakhuriza, I. (2018). *Analisis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2016*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Paramawidhita, W. (2015). *Analisis Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan di Kabupaten Dan Kota Sukabumi (Periode Tahun 2007-2013)*. Institut Pertanian Bogor.
- Pasaribu, R. B. F. (2012). *Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan*. Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Pratiwi, D. (2013). Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kota Madiun Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. *Ekomaks*, 2(1), 121–131.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica*, 10(1), 1–18.
- Rohman, T. (2011). *Analisis Sektor Ekonomi Basis Kabupaten Ngawi Tahun 2001-2010*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sanjaya, M. K. (2014). *Analisis sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi di kota madiun tahun 2007-2011*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Soepono, P. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 16(1), 41–53.
- Soleh, A., & Maryoni, H. S. (2017). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja dan Investasi Di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(1), 15–30.
- Suciati, T. D. (2017). *Analisis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, & Hasbiullah. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Iqtisaduna*, 1(1), 71–86.
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, R. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tariqi, A. A. H. at. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Wahyudi, E. (2017). *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Ponorogo Dengan Metode Location Quotient Dan Shift Share Tahun 2011-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijaya, D. S. M. (2012). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Ngawi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yulianti, I. (2017). *Analisis Sektor Potensi Unggulan Guna Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Magelang*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.